

DESKRIPSI PENCAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2007-2011

¹ A.A Istri Dewi Adhi Utami, ² Made Artana, ³ Lulup Endah Tripalupi

^{1,2,3} Jurusan Pendidikan Ekonomi, FEB
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: suyasa_agung@yahoo.co.id, artanamade50@yahoo.com,
lulup_tripalupi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng dan yang menjadi objek penelitian adalah pertumbuhan ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada kurun waktu 2007-2011 adalah pada tahun 2007 sebesar 5,72%, tahun 2008 sebesar 6,00%, tahun 2009 sebesar 6,25%, tahun 2010 sebesar 6,50% dan tahun 2011 sebesar 6,75%. Realisasi pertumbuhan ekonomi dari rencana yang ditetapkan hanya pada tahun 2007 yang bisa mencapai target. Realisasi pada tahun 2007 mencapai 5,82% dari target yang direncanakan sebesar 5,72%. Namun untuk empat tahun berikutnya yaitu tahun 2008-2011 tidak mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi yang dicapai pada tahun 2008 adalah 5,84%, tahun 2009 mencapai 6,10%, tahun 2010 sebesar 5,85% dan tahun 2011 sebesar 6,11%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah, rendahnya minat investor untuk berinvestasi, tingginya angka pengangguran dan rumah tangga miskin. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, meningkatkan keterampilan usaha mikro kecil dan menengah, mengembangkan sistem perijinan satu atap, meningkatkan kesempatan kerja dan mengoptimalkan peran tim penanggulangan kemiskinan daerah.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi

Abstract

The research aimed at describe the realization of the plan and achievement of economic growth, obstacles faced and the efforts of the Government of Buleleng regency in achieving economic growth in 2007- 2011. The research was a descriptive qualitative research. Subject in this research was the Head of Regional Development Planning Board of Buleleng regency, and the object of study is economic growth. Data collection techniques used namely documentation and interviews. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results showed that the plan of economic growth in Buleleng regency period 2007-2011 was 5.72% in 2007, 6.00% in 2008, 6.25% in 2009, 6.50% in 2010 and 6.75% in 2011. Realization of the economic growth plan established that could reach the target only in 2007. Realization in 2007 reached 5.82% of the planned target by 5.72%. But for years latter, namely in 2008-2011 did not his the target as planned, the realization that achieved in 2008 was 5.84% reaching 6,10% in 2009 and the in 2010 was 5.85% and by 6.11% in 2011. Constraints faced in achieving the economic growth are the limited resources of the government apparatus, the low interest of investors to invest, high

unemployment and poor households. The efforts made by the government in achieving the economic growth are improving the quality of government officials, improve the skill of micro, small and medium enterprises, to develop one-stop systems, increase employment opportunities and to optimize the role of regional poverty alleviation team.

Key words: economic growth.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diberlakukan menjadi undang-undang organik dalam rangka mengimplementasikan tentang konsep desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Konsep desentralisasi ini setelah era reformasi lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat pencapaian target pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor yang sangat besar peranannya dalam mendorong kesejahteraan rakyat adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Percepatan proses pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan di daerah bersangkutan (Heru Mahaputra, 2002). Pengertian konsep pembangunan ekonomi yang paling mudah dan populer adalah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dikaitkan dengan taraf hidup yang lebih baik, terutama dari segi akumulasi modal dan kekayaan sebuah negara atau daerah. Kemakmuran ekonomi suatu negara dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut dari tahun ke tahun. Jika kadar pertumbuhan ekonomi suatu negara itu meningkat dari masa ke masa, ini bermakna bahwa pembangunan pada sektor ekonomi tumbuh pesat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya, karena dengan

adanya pembangunan ekonomi secara signifikan dan terstruktur pada suatu negara akan menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh karena itu untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan.

Menurut Todaro (2000:18) "pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar dari semua aspek atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan". Menurut Kursyid Ahmad (2008: 27) "pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan secara fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara". Kemudian menurut Idris Parakkasi (2007:43) "pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat". Pertumbuhan ekonomi selalu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sering kali pertumbuhan ekonomi tinggi yang di capai tidak serta merta diikuti oleh peningkatan kesejahteraan rakyat. Fenomena ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi

yang tidak berkualitas, artinya pertumbuhan ekonomi yang telah di capai tidak merata dan tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Pendapat senada juga diutarakan oleh Faried Wijaya (1999:264) yang menyatakan "pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan riil". Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output riil*. Selanjutnya Suryana (2000:23) menyatakan "pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup di ukur *output riil* per orang, karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan *output riil* total lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk". Menurut Lincoln Arsyad (2001:7) bahwa "pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Product Domestik Bruto/ Product Nasional Bruto* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau kah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak".

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Todaro (2000) menjelaskan, sumber pertumbuhan ekonomi dapat meliputi berbagai faktor, namun faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya fisik, yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya Alam Syahrudin (2006) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada empat komponen sebagai berikut. 1) Tanah, merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki suatu negara baik meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan cuaca, kondisi iklim, kekayaan hasil hutan dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam ini sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan. Secara umum, negara memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan negara yang

kurang memiliki kekayaan alam. Namun, kekayaan alam yang berlimpah, tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai dan pasar yang potensial. Pendapat senada disampaikan oleh Jhingan (2010) bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan perekonomian adalah tanah atau kekayaan alam. "Tanah" sebagaimana yang dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup kesuburan tanah, letak, kekayaan hutan, iklim, sumber air dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam adalah hal yang penting. Namun, ketersediaan sumber alam ini juga harus di dukung dengan adanya sumber daya manusia, teknologi serta modal yang baik di dalam pengelolaannya. 2) Kuantitas dan kualitas penduduk serta tenaga kerja. Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi acuan dalam pembangunan. 3) Kemajuan Teknologi, berkaitan dengan kepemilikan modal. Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju. Hal yang senada juga dijelaskan oleh Jhingan (2010) bahwa kepemilikan barang modal tidak dapat terlepas dari adanya kemajuan perubahan teknologi. Kedua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena hal ini berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan. Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas buruh, modal dan juga faktor produksi lain. 4) Sistem sosial dan sikap masyarakat, memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hasil

identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal pertanahan dianggap juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menurut Sadono Sukirno (2005) dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi.

Dalam mempertimbangkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut seperti yang diuraikan di atas tidak dapat terlepas dari fungsi dan peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Lewis (dalam Ida Nuraini, 2008) fungsi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi adalah memelihara jasa publik, mempengaruhi masyarakat, memperbanyak institusi ekonomi, mempengaruhi penggunaan sumber daya, mempengaruhi distribusi pendapatan, mengatur jumlah uang yang beredar, mengatur fluktuasi, memastikan tidak ada pengangguran dan mempengaruhi tingkat investasi. Selanjutnya Adam Smith (dalam Suryana, 2000) menyatakan pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Peranan tersebut adalah 1) peranan untuk memelihara keamanan dalam negeri, 2) peranan dalam menyelenggarakan peradilan terutama dalam hal kebijakan, 3) peran menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada kurun waktu 2007-2011 telah berusaha berperan untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi yang dimiliki, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, tampaknya Kabupaten Buleleng menghadapi pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif. Kondisi ini dapat dilihat dari total pencapaian pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Buleleng pada kurun waktu 2007-2011 masih berada dibawah Provinsi Bali. Pada tahun 2007-2011 total laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 5,94 % sedangkan Provinsi Bali sebesar 5,96%. Bahkan kalau dibandingkan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2011, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,68% tetapi dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tidak mampu mencapai target karena hanya mencapai angka 6,11%. Data realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun pada tahun tertentu realisasi pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sebesar 5,82% meningkat menjadi 5,84% pada tahun 2008, kemudian tahun 2009 mencapai angka 6,10% dan pada tahun 2010 sebesar 5,85%, pada tahun 2010 ini terlihat realisasinya mengalami penurunan sebesar 0,25%. Sedangkan untuk tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng kembali mengalami peningkatan sebesar 6,11%.

Terjadinya penurunan persentase laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng disebabkan karena kurangnya pengelolaan dalam rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, maka pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2007-2011 telah berusaha menata kembali konsep-konsep pembangunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Peranan pemerintah di dalam menyusun program pembangunan ekonomi perlu mendapat perhatian lebih. Untuk melihat program ekonomi pemerintah dapat dicermati dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD akan menunjukkan seberapa besar pendapatan pemerintah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah. Dari pendapatan ini akan terlihat kekuatan anggaran yang akan dibelanjakan berupa belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Proporsi belanja langsung

dengan belanja tidak langsung juga menunjukkan arah pembangunan yang dilaksanakan. Beranjak dari peranan pemerintah tersebut, maka untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dimulai dari rencana dan realisasi penerimaan anggaran yang sesuai dan sangat diharapkan hal ini akan mampu memenuhi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang direncanakan. Berkaitan dengan masalah pengaturan keuangan daerah ini, pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya merangkai berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang "Deskripsi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2007-2011".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi, realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan Kepala Bappeda beserta jajarannya dan data sekunder yang berupa laporan mengenai realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen tentang rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 yang berupa Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2007-2011 sedangkan teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng yang dinilai sangat mengetahui dan menguasai permasalahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011. Untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh melalui wawancara, peneliti juga melakukan wawancara kepada staf pegawai Bappeda. Dari metode wawancara ini di peroleh data pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dari tahun 2007-2011 beserta kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran dan uraian secara menyeluruh mengenai pertumbuhan ekonomi. Pengolahan dan penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dan hal-hal yang melatarbelakangi, yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini analisis terhadap data yang didapatkan melalui wawancara, disajikan secara deskriptif dengan menguraikan atau menggambarkan kembali dan menghubungkan data, fakta dan informasi yang diperoleh. Data dari dokumen yang diperoleh selanjutnya juga diuraikan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 dan kendala yang dihadapi pemerintah serta upaya yang dapat dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adapun hasil penelitian mengenai rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rencana dan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2007-2011

Tahun	Rencana (%)	Realisasi (%)
2007	5,72	5,82
2008	6,00	5,84
2009	6,25	6,10
2010	6,50	5,85
2011	6,75	6,11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa antara rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dirancang pada RPJMD Kabupaten Buleleng terlihat bahwa hanya pada tahun pertama yaitu tahun 2007 yang bisa memenuhi target pencapaian pertumbuhan ekonomi. Realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 direncanakan sebesar 5,72% dengan realisasi yang dicapai sebesar 5,82% meningkat sebesar 0,10%. Namun empat tahun berikutnya yaitu pada tahun 2008-2011 tidak mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang direncanakan. Jika kita perhatikan data yang ada pada tabel 1 secara cermat, proses perencanaan pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dibuat secara tetap dengan meningkatkan presentase pertumbuhan ekonomi secara *gradual* sebesar 0,25 % setiap tahunnya, sehingga kurang memperhatikan faktor-faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng baik itu faktor ekonomi maupun non ekonomi. Salah satu contoh yaitu pada tahun 2008 terjadi proses pemilukada Provinsi Bali yang secara empirik sering berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan maupun situasi sosial sehingga akan berpengaruh kepada keyakinan para investor dalam menanamkan investasinya di Buleleng.

Dengan situasi yang kurang meyakinkan untuk berinvestasi dari segi keamanan tentu mereka akan menunda proses ataupun transaksi investasinya. Salah satu faktor seperti ini yang tidak diperhatikan untuk dijadikan referensi dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sama pada setiap tahunnya sebesar 0,25% maka faktor-faktor yang berpengaruh tidak mendapat pertimbangan yang kuat dan cermat.

Berdasarkan atas capaian kinerja tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 maka dapat dilihat faktor-faktor yang menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng. Pada uraian realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 tampak bahwa selama lima tahun hampir semua target yang ditetapkan hasilnya tidak tercapai dengan sempurna kecuali realisasi pada tahun 2007. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2007-2011 adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Buleleng, seperti kualitas sumber daya petani kita yang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman dan pola pengelolaan produksi pertanian termasuk pasca panen yang masih banyak menggunakan pola tradisional dimana peralatan yang digunakan masih sederhana. Akibatnya hasil pertanian kurang berkualitas dan cenderung memiliki harga rendah ketika masa panen tiba. 2) Keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah dalam penyusunan target-target kinerja untuk merancang perencanaan pembangunan masih bersifat konvensional yaitu pemerintah menggunakan proyeksi naik setiap tahunnya dengan persentase tetap dalam penetapan rencana pertumbuhan ekonomi serta kurang menggunakan analisis data yang akurat dan valid dalam perencanaan pembangunan sehingga banyak pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai. 3) Sebagai salah satu akibat dari keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah maka program kegiatan yang disusun dan dilaksanakan

tidak dapat secara maksimal memberikan dorongan kepada masyarakat atau publik untuk meningkatkan kualitas produk usahanya. Sehingga dalam berbagai usaha ekonomi, masyarakat tidak memiliki kualitas produk yang memadai untuk dapat bersaing pada pasar global. 4) Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. 5) Kecilnya ruang investasi yang tertanam di Buleleng menyebabkan sempitnya kesempatan kerja yang ada sehingga membawa dampak pada tingginya angka pengangguran di Kabupaten Buleleng. 6) tingginya angka pengangguran menyebabkan penurunan angka kemiskinan menjadi sangat lambat sehingga beban daerah terhadap tingginya angka kemiskinan sangat memberatkan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan pembiayaan pembangunan.

Melihat kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah berusaha melakukan langkah-langkah ke depan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang direncanakan yaitu dengan membuat kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yang diarahkan pada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan tersedianya bahan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat, mendorong serta menghidupkan kembali usaha ekonomi rakyat melalui pembinaan usaha industri kecil dan menengah, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta menciptakan suasana yang kondusif untuk terjaminnya ketenangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan. Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan kondisi-kondisi dimana seluruh elemen daerah mengetahui

tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan upaya-upaya dengan menetapkan kebijakan dan program-program untuk menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. 1) Dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya pertanian, pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya petani melalui penyuluhan, bimbingan teknis produksi pertanian dan membangun jiwa kewirausahaan dikalangan petani. Selanjutnya melakukan studi banding kelompok tani ke daerah yang berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. 2) Dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah melalui bimbingan teknis perencanaan pembangunan khususnya dalam menganalisis laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran untuk memberikan kesempatan mengikuti bimbingan teknis perencanaan kepada para pegawai sebanyak 10-15 orang setiap tahunnya. 3) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memproduksi barang-barang dengan kualitas *ekspor*. 4) Mengembangkan sistem perijinan satu atap dalam bentuk dibukanya kantor pelayanan terpadu. Kantor pelayanan terpadu merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus perijinan dengan sistem satu atap artinya segala jenis perijinan dilakukan di kantor pelayanan terpadu tersebut. 5) Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 6) Mengoptimalkan peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) melalui koordinasi proses perencanaan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan

kemiskinan. Program-program yang dilaksanakan untuk masyarakat diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian tentang rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2007-2011 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dirancang naik setiap tahun rata-rata 0,25%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 5,72%, tahun 2008 sebesar 6,00%, tahun 2009 sebesar 6,25%, pada tahun 2010 sebesar 6,25% dan tahun 2011 sebesar 6,75%. Secara bertahap peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi ini tentunya sangat riskan dalam realisasinya. Hal ini disebabkan kondisi daerah selama kurun waktu masa jabatan kepala daerah tentunya tidak sama dari satu tahun ke tahun berikutnya. Beberapa prediksi fenomena ekonomi maupun non ekonomi yang berpengaruh hendaknya tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dirancang pada RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan dalam realisasinya. Untuk tahun 2007 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82% berada lebih tinggi dari rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72%. Pada tahun 2008 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84% berada dibawah target yang direncanakan sebesar 6,00%, tahun 2009 realisasinya mengalami peningkatan menjadi 6,10% dari tahun 2008 namun masih berada dibawah rencana sebesar 6,25%. Terlebih lagi pada tahun 2010 terjadi penurunan dalam realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85% sehingga semakin jauh dalam pencapaian target yang direncanakan sebesar 6,50%. Selanjutnya pada tahun 2011 rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 6,75% namun realisasinya masih sangat jauh dibawah target yang direncanakan yaitu sebesar

6,11%. Secara keseluruhan selama lima tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dari tahun 2007-2011 tidak tercapai kecuali pada tahun 2007 yang bisa melampaui target pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Faktor-faktor tersebut terlihat dari kontribusi masing-masing sektor yang ada di Kabupaten Buleleng. Sektor yang besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa di luar perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan dan pertambangan; sektor gas, listrik dan air minum; serta sektor bangunan.

Dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, diakui bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng masih menemukan kendala-kendala dalam merealisasikan rencana pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan. Adanya kendala yang ditemukan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang masih menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Faktor lain yang menjadi kendala pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng adalah kecilnya ruang investasi yang tertanam di Buleleng serta tingginya angka pengangguran yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan menjadi lambat.

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi tersebut maka pemerintah Kabupaten Buleleng berusaha melakukan upaya-upaya guna mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di segala bidang baik

itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan masyarakat yang nantinya dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya dalam bidang ekonomi adalah kebijakan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah, kebijakan investasi, meminimalisasi pengangguran dan kemiskinan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian dapat disimpulkan bahwa rencana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2007-2011 yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012 adalah pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 5,72%, tahun 2008 sebesar 6,00%, tahun 2009 sebesar 6,25%, tahun 2010 sebesar 6,50% dan tahun 2011 pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 6,75%. Selanjutnya realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 seperti yang dimuat dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah adalah pada tahun 2007 realisasi yang dapat dicapai adalah sebesar 5,82%, tahun 2008 sebesar 5,84%, tahun 2009 sebesar 6,10%, tahun 2010 sebesar 5,85% dan tahun 2011 sebesar 6,11%.

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011 adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi, penyusunan target-target kinerja dalam perencanaan pembangunan masih bersifat konvensional, rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Buleleng, tingginya angka pengangguran dan rumah tangga miskin di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya

upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kendala dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2007-2011 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur pemerintah melalui bimbingan teknis, meningkatkan keterampilan UMKM, mengembangkan sistem perijinan satu atap, meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan mengoptimalkan peran tim penanggulangan kemiskinan daerah.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1) Hendaknya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara komprehensif termasuk meningkatkan kemampuan prediksi terhadap fenomena yang akan terjadi sehingga rencana pertumbuhan ekonomi yang disusun menjadi lebih realistis bukan semata-mata karena kepentingan yang bersifat politis. 2) Untuk mencapai realisasi target pertumbuhan ekonomi hendaknya Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun kegiatan-kegiatan atau program-program yang lebih fokus pada program kegiatan yang mendorong pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi program yang bersifat inefisiensi atau bersifat boros anggaran tetapi tidak mendorong pencapaian target pertumbuhan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Kursyid. 2008. *Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Arsyad, Lincolin. 2001. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan Ke-13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahaputra, Heru. 2002. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Input dalam Formulasi Kebijakan Publik di Bidang Ekonomi di Kabupaten Tabanan*. Tesis (tidak diterbitkan). Jurusan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Nuraini, Ida. 2005. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: UMM
- Parakkasi, Idris. 2007. *Islamic Economic*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng 2007-2012*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Samuelson, Nordhaus. 2001. *Ilmu Ekonomi. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global. Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat
- Syahrudin, Alam. 2006. *Ekonomi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Faried. 1999. *Kompedium Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.